



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 09 Juni 2021

Halaman: 1

Tarif 'Nuthuk' Jadi Bahasan Pemda DIY
Penerapan Parkir Premium
Dikaji



ALASAN PARKIR PREMIUM

- Muncul tarif parkir ilegal di kawasan strategis.
- Karena 'nuthuk' dikeluarkan wisatawan.
- Untuk kawasan strategis, layak lebih mahal, atau premium namun legal.
- Membutuhkan penyesuaian Perda.

Sumber: Pemda DIY Grafik: JQS

YOGYA (KR) - Sejumlah kritikan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial saat libur panjang beberapa waktu lalu menjadi perhatian dari Pemda DIY. Agar tidak terulang kasus serupa, Pemda DIY melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengatasi persoalan yang ada, untuk kemudian dilakukan pembinaan. Sehingga keluhan dari wisatawan harga makanan yang mahal dan parkir *nuthuk* tidak terulang lagi.

"Guna membahas persoalan di atas, kami melakukan rapat bersama dengan kabupaten/kota, dengan melibatkan Sekda dan OPD. Kami mencoba memahami masukan banyak teman-teman terkait berbagai persoalan pariwisata, seperti keluhan terkait harga pecel lele, parkir, jip dan retribusi. Selain beberapa hal itu masalah parkir *nuthuk* di Malioboro juga menjadi pembahasan kami," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di kantornya, Selasa (8/6).

Baskara Aji mengungkapkan, maraknya fenomena parkir *nuthuk* di DIY bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan juru parkir mengalami kekurangan pendapatan. Kondisi itu dikhawatirkan menjadikan mereka mematok tarif parkir di luar ketentuan pemerintah untuk mendapat penghasilan berlebih.

Guna mengantisipasi kemunculan fenomena serupa, Pemda DIY akan mengkaji penerapan parkir premium di wilayah Malioboro. Sehingga, khusus di tempat parkir yang dikelola pemerintah,

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Penerapan Sambungan hal 1

tarifnya akan jauh lebih mahal, ditentukan dari jarak menuju kawasan Malioboro.

"Parkir dengan tarif sebesar Rp 10.000,- atau Rp 20.000,- seperti yang dikeluarkan wisatawan biasanya jadi viral. Ya sudah sekarang parkir tarifnya Rp 20.000,- saja seperti saran Pak Gubernur, tarifnya premium. Mungkin dulu Rp 5 ribu cukup sekarang bisa jadi Rp 10.000 atau Rp 20.000,- tapi ada aturan dasar hukumnya, misalnya semacam Perda. Tapi semua itu sifatnya masih wacana, jadi masih perlu pembahasan lebih lanjut," paparnya.

Komentar serupa diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo menegaskan industri pariwisata tidak bisa sendiri menyikapi berbagai masukan perihal kasus harga serba *nuthuk* yang viral baru-baru ini. Ia mengimbau wisatawan yang tidak berizin di DIY. Untuk itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama-sama mengambil langkah menyelesaikan permasalahan permasalahan tersebut.

"Kami mengupayakan agar hal-hal yang sudah terjadi tersebut tidak terulang lagi. Peran dari monitoring, evaluasi dan penegakan hukum, law enforcement hingga reward and punishment menjadi bagian yang sangat penting untuk membuat situasi lebih baik sehingga tidak ada keluhan atau komplain dari masyarakat. Keluhan atau masukan tersebut sudah tentu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami," paparnya. (Ria/ra)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005